

UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA KOREA SELATAN DALAM KASUS JUGUN IANFU TAHUN 1993-2020

Maretiana Dwi Ariani¹

Abstract: *The purpose of this research is to explain how the South Korean Dispute Resolution Efforts in the Jugun Ianfu Case 1993-2020. This research method uses descriptive research with sources from books, journals, websites and various reliable news. In this study using the concept of Dispute Resolution using the understanding of international disputes from J.G Starke and Sexual Violence from various journals that discuss Sexual Violence.*

Keywords: *South Korea, Japan, Jugun Ianfu, Final and Irreversible*

Pendahuluan

Jugun Ianfu (従軍慰安婦) adalah sebuah sistem perbudakan seksual kepada para perempuan yang dibentuk oleh pemerintah Jepang sebagai pemuas seksual para tentara militer Jepang yang saat itu sedang mengikuti perang. Perbudakan seksual ini terjadi selama masa Perang Asia Pasifik tahun 1931-1945. Menurut Dr. Hirofumi Hayashi, seorang professor di Universitas Kanto Gakuin, para perempuan yang diambil untuk menjadi seorang wanita penghibur bersal dari negara-negara di Asia seperti Malaysia, Indonesia, Taiwan, Cina, Korea, Thailand, Myanmar, Vietnam, India. Menurut data tahun 1996, jumlah keseluruhan wanita yang menjadi *jugun ianfu* diperkirakan sekitar 50.000-200.000 orang (Sarah Soh, 1996).

Alasan pemerintah Jepang membentuk sistem *jugun ianfu* ini adalah karena mereka tidak ingin para tentara Jepang mengalami depresi selama mengikuti perang. ahli sejarawan Yoshimi Yoshiaki mengatakan bahwa “*The Japanese Imperial Army feared the most that the simmering discontentment of the soldiers could explode into a riot and revolt. That is why it provide women*” (www.koreantimes.co.kr). Sehingga pemerintah Jepang mengambil para perempuan muda untuk dijadikan seorang wanita penghibur.

Cara yang digunakan untuk membawa para wanita ke Jepang dengan menjanjikan mereka sebuah pekerjaan yang bagus serta bisa bersekolah disana (Academia Edu, 2018). Para wanita yang percaya begitu saja dengan janji yang diberikan akhirnya bersedia pergi ke Jepang. Namun, setelah tiba disana mereka terkejut karena langsung dibawa ke rumah bordil tempat peristirahatan para tentara Jepang. Di tempat itulah mereka dipaksa untuk melayani kebutuhan seksual para tentara.

Awal mula upaya untuk memperjuangkan hak-hak para korban mantan *jugun ianfu* dimulai oleh masyarakat Korea Selatan sendiri beserta lembaga Non-Government (NGO) yang bernama Korean Council for The Women Drafted for Military Sexual Slavery yang mengadakan demonstrasi setiap hari rabu untuk menuntut pertanggungjawaban dari pemerintah Jepang untuk para korban yang masih hidup (Sarah Soh, 1996). Setelah melihat perjuangan masyarakat, organisasi serta para korban,

¹ Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email : maretianadwiariani@gmail.com.

akhirnya pemerintah Korea Selatan juga menuntut pemerintah Jepang untuk menyelesaikan tanggung jawab hukumnya kepada para korban mantan *jugun ianfu*.

Kesepakatan yang telah dibuat pada tahun 2015 di masa pemerintahan Park Geun Hye ini dinilai tidak mewakili semua pendapat para korban mantan *jugun ianfu*, sehingga kasus *jugun ianfu* tidak bisa diselesaikan dengan kesepakatan tersebut. Presiden Korea Selatan, Moon Jae In tidak ingin kasus *jugun ianfu* hanya bisa diselesaikan dengan kesepakatan itu dan meminta agar pemerintah Jepang segera mencari solusi lain untuk menyelesaikan tanggung jawab hukum mereka (www.liputan6.com).

Selain itu, Pemerintah Korea Selatan juga mengatakan bahwa mereka akan mencoba berdiskusi dengan para korban mengenai tuntutan yang mereka inginkan dari Jepang. Para mantan korban *jugun ianfu* terus menuntut agar Jepang tidak selalu menggunakan uang untuk menyelesaikan tanggung jawab mereka dan menghindari kejahatan perang yang mereka lakukan.

Kerangka Dasar Teori dan Konsep

Konsep Penyelesaian Sengketa

Sengketa internasional adalah (*international disputes*) mencakup bukan saja sengketa atas negara, melainkan juga kasus lain yang berada dalam lingkup internasional.

Menurut J.G. Starke, metode-metode penyelesaian sengketa digolongkan dalam dua kategori :

1. Cara-cara penyelesaian damai, yaitu apabila para pihak telah dapat menyepakati untuk menemukan suatu solusi yang bersahabat.
2. Cara-cara penyelesaian secara paksa, yaitu apabila solusi yang dipakai atau dikenakan adalah melalui kekerasan.

Kemudian kedua golongan ini diklasifikasikan lagi menjadi beberapa bagian, yaitu untuk penyelesaian damai adalah sebagai berikut :

a. Arbitrase (*Arbitration*)

Penyelesaian sengketa secara arbitrase biasanya menyerahkan sengketa mereka untuk diselesaikan oleh arbitrator, yang dipilih secara bebas oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Para arbitrator ini biasanya diambil dari warga negara yang bersengketa.

b. Penyelesaian yudisial (*judicial settlement*)

Penyelesaian yudisial berarti suatu penyelesaian dihasilkan melalui suatu pengadilan yudisial internasional yang dibentuk sebagaimana mestinya, dengan memberlakukan kaidah-kaidah hukum.

c. Negosiasi, jasa-jasa baik (*good offices*), mediasi, konsiliasi, dan penyelidikan (*inquiry*)

Merupakan penyelesaian yang tidak begitu formal dibandingkan dengan arbitrase dan penyelesaian yudisial.

d. Penyelesaian di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Jika penyelesaian sengketa dilakukan oleh PBB, maka pihak PBB akan menyerahkan sengketa ke Majelis Umum atau Dewan Keamanan untuk memberikan sebuah langkah-langkah atau solusi yang tidak mengganggu hubungan diplomatik kedua belah pihak negara yang bersengketa.

Ketika sebuah negara tidak setuju untuk menyelesaikan sengketa mereka secara damai, solusi lain yang mungkin harus diberlakukan adalah dengan cara paksaan. Model penyelesaian secara paksa yaitu :

- a. Perang bersenjata dan non-senjata
- b. Retorsi (*retortion*)
- c. Tindakan pembalasan
- d. Blokade wilayah secara damai (*pacific blockade*)
- e. Intervensi

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian eksplanatif, yaitu menjelaskan bagaimana upaya Korea Selatan dalam menyelesaikan kasus jugun ianfu yang dimulai pada tahun 1993-2019. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, dimana data yang diambil tidak berasal dari sumber langsung, melainkan dari data sumber maupun referensi yang berkaitan dengan penelitian seperti buku, jurnal, dan artikel-artikel. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini bersifat studi kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan data yang dipublikasikan seperti e-book, jurnal, berita-berita internasional. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan analisis data yang berbentuk data dan kalimat.

Hasil Penelitian

Sejarah Awal Jugun Ianfu

Jugun ianfu adalah sebutan untuk para perempuan yang diambil untuk dijadikan seorang wanita penghibur. *Jugun ianfu* di dalam bahasa Inggris disebut dengan *comfort women* dan perempuan ini diambil dari negara-negara jajahan Jepang untuk melayani kebutuhan seksual para tentara Jepang selama masa perang Asia Pasifik.

Jepang sudah lama mengenal dunia prostitusi, namun yang terlibat dalam prostitusi hanyalah *geisha* dan *karayuki-san*. *Karayuki-san* adalah para wanita yang melakukan perjalanan mulai dari Asia Timur hingga ke Asia Tenggara sebagai pekerja seks. *Geisha* adalah gadis muda yang menghibur tamu dengan menyanyi dan menari yang diiringi dengan alat musik tradisional Jepang. Perbedaan dari *geisha* dan *karayuki-san* adalah *geisha* diberikan pelatihan agar mereka bukan hanya bisa melayani tamu dengan pelayanan seksual, tetapi juga melayani tamu dengan nyanyian dan tarian. Sedangkan *karayuki-san*, mereka hanya bertugas untuk melayani kebutuhan seksual para tamu yang membayar mereka. Tamu yang mereka layani bukan hanya dari dalam negeri, tetapi juga luar negeri.

Pada pertengahan abad ke-19, politik isolasi di rezim Tokugawa runtuh akibat adanya tekanan kepada Jepang untuk membuka jalur perdagangan dan juga adanya beberapa kapal asing yang mengunjungi Pelabuhan Jepang. Pada saat inilah Jepang mulai memperdagangkan para wanita keluar negeri untuk terlibat dalam dunia prostitusi. Pada era setelah Restorasi Meiji tahun 1868, jumlah *karayuki-san* semakin bertambah. Tujuan para *karayuki-san* ini bukan hanya ke dalam negeri, namun juga ke beberapa negara di Asia Tenggara, India, Australia, Hawaii, bahkan sampai ke Cape Town di Afrika Selatan. Namun, pusat prostitusi Jepang adalah Vladivostok, Shanghai, dan Singapura.

Perwakilan perdagangan Jepang yang bernama Sewaki Kazuto mengunjungi Vladivostok tahun 1875. Disana, Sewaki menemukan sebuah rumah prostitusi yang dikelola oleh seorang warga Jepang. Rumah prostitusi tersebut melayani para tamu yang berasal dari Rusia. Karena jumlah *karayuki-san* semakin bertambah di Valdivostok, yaitu sekitar 200 orang pada tahun 1887, pemilik rumah prostitusi itu berpikir untuk memperluas bisnis prostitusinya ke luar mulai dari Shanghai hingga ke Singapura.

Namun tercatat, ada 223 kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh tentara Jepang, kemudian Letnan Jenderal Okamura Yasuji meminta kepada gubernur Prefektur Nagasaki untuk mengirimkan wanita penghibur ke Shanghai. Selain itu, Jenderal Okamura Yasuji juga mengusulkan agar mendirikan rumah bordil untuk mencegah pemerkosaan tentara Jepang kepada warga sipil Cina. Letnan Jenderal Okamura Yasuji juga yang mempunyai ide pendirian *comfort station* yang didirikan di Shanghai untuk pertama kalinya pada bulan Maret 1932.

Sistem *jugun ianfu* menjadi sebuah kebijakan umum bagi pasukan Kekaisaran Jepang serta bagaimana kebijakan ini diimplementasikan oleh para pemimpin militer yang terlibat langsung. Namun, tidak banyak data dan laporan yang tersedia karena terbatasnya akses dokumentasi dan juga laporan penting sudah lama hilang.

Namun, dalam dokumen dari Ministry of War (Kementeerian Perang) yang berisi intruksi berjudul “hal-hal yang berkaitan dengan perekrutan para pekerja dan wanita untuk *comfort station* militer” mengatakan bahwa dalam merekrut agen dan para wanita, beberapa orang mengklaim bahwa mereka mendapatkan izin dari para petinggi militer sehingga merusak reputasi militer Jepang dan menyebabkan kesalahpahaman di lingkungan masyarakat umum. Beberapa masalah yang muncul salah satunya adalah merekrut wanita secara ilegal saat perang berlangsung dan lain sebagainya. Karena pemilihan agen yang tidak sesuai, akhirnya para petinggi militer Jepang memutuskan untuk menyeleksi para agen secara ketat dan bekerjasama dengan *kempetai* (polisi militer) selama merekrut para wanita untuk menjaga reputasi militer Jepang di lingkungan masyarakat.

Surat itu disusun oleh staf Biro Administrasi Militer dan dikeluarkan atas nama Kolonel Fushibuchi Senichi. Wakil Menteri Perang saat itu yang bernama Umezu Yoshijird juga menyetujui isi surat tersebut. Yang terpenting, surat tersebut Sugiyama Hajime.

Ada beberapa cara dalam merekrut para perempuan ini, yaitu dengan penipuan. Taiwan dan Korea sebagai salah satu negara yang miskin karena dijajah oleh Jepang dan bahkan mengambil sumber bahan makanan mereka. Para perempuan disana sudah bekerja sejak di usia yang sangat muda untuk menghidupi kebutuhan keluarga mereka. Hal ini dimanfaatkan oleh Jepang untuk merekrut para perempuan muda ini agar mau menjadi seorang wanita penghibur. Mereka ditipu dengan cara dijanjikan untuk diberikan sebuah pekerjaan bagus seperti menjadi pelayan atau juru ketik, dan akan diberikan gaji yang cukup besar. Akhirnya, banyak perempuan muda ini yang tertarik dengan tawaran yang diberikan oleh para perekrut ini.

Cara lain yang digunakan selain menipu adalah dengan membeli para perempuan muda dari beberapa keluarga yang kurang mampu atau sedang terlibat dengan utang. *The Southeast Asia Translation and Interrogation Center (SEATIC) Psychological Warfare Interrogation Buletin* No.2 bahwa pengelola *comfort station* di Burma yang berasal dari

Jepang yang beroperasi di bawah otoritas militer, mengatakan mereka membeli para perempuan Korea untuk dijadikan seorang *jugun ianfu* dengan harga 300-1000 yen. Harga ini tergantung dari karakter, penampilan dan usia dari para perempuan tersebut.

Laporan dari *U.S Office of War Interrogation Report* (OWI Report) mengatakan bahwa untuk para perempuan yang keluarganya mempunyai jeratan hutang, mereka memiliki kontrak kerja selama enam bulan hingga satu tahun tergantung seberapa banyak hutang mereka. Selain itu, mereka juga tidak bisa meninggalkan comfort station meskipun hutang telah dibayar lunas sesuai dengan persyaratan kontrak dan tetap dipaksa untuk menjadi seorang *jugun ianfu*.

Penjajahan Jepang Atas Korea dan Sejarah Perekrutan Jugun Ianfu di Korea

Tahun 1868 setelah Restorasi Meiji, Jepang ingin memperluas kekuasaannya ke Korea. Setelah menandatangani perjanjian persahabatan dengan Korea, Jepang mulai ingin ikut campur urusan dalam negeri Korea namun Korea menolak hal ini. Dinasti Qing yang sudah lama menjadi negara *surezain* untuk Korea berselisih dengan Jepang untuk memperebutkan Korea. Akhirnya Perang Jepang-Tiongkok dimulai pada bulan Agustus 1894.

Setelah berhasil mengalahkan Cina dalam perang tersebut, Jepang kembali mendapat ancaman dari Rusia yang sudah melakukan aktifitasnya di Korea dan Manchuria. Hal ini membuat kepentingan ekonomi dan politik Jepang di Asia Timur menjadi terganggu dan mengakibatkan pecahnya Perang Rusia-Jepang pada September 1904 hingga Februari 1905. Namun sebelum perang dimulai, Jepang mengambil langkah untuk menjajah Korea pada bulan Agustus 1904 dengan memberlakukan “Konvensi Pertama Jepang-Korea” kepada Korea. Konvensi ini memungkinkan Jepang untuk memberikan pengaruh besar dalam dua fungsi dasar negara yaitu administrasi negara dan urusan luar negeri.

Pada awal tahun 1905, Jepang memenangkan perang melawan Rusia. Dengan kemenangan ini, Amerika Serikat dan Taiwan mengizinkan Jepang untuk memegang kendali atas Korea dan akhirnya Jepang resmi menjajah Korea. Pada bulan November 1905, seorang utusan khusus Jepang yang bernama Ito Hirobumi memaksa menteri luar negeri Korea untuk memasang meterai Perjanjian Protektorat (yang disebut dengan Konvensi Korea-Jepang). Dengan konvensi ini, Korea kehilangan kekuatan diplomatic dan otonomi di dalam negeri.

Cara perekrutan para wanita di Korea untuk dijadikan wanita penghibur atau *jugun ianfu* sama dengan yang dilakukan oleh para tentara Jepang yang menyewa agen untuk melakukan tugasnya yaitu membeli dan menipu para wanita. Namun, ada juga beberapa wanita Korea yang secara sukarela menjadi wanita penghibur untuk menghidupi keluarga mereka. Bahkan para wanita yang sudah menikah ikut menjadi wanita penghibur karena suami mereka yang bekerja terlalu jauh. Para wanita muda Korea yang dijual ke rumah bordil menerima uang muka yang sangat sedikit daripada uang muka yang diberikan untuk para wanita Jepang.

Kehidupan Wanita Jugun Ianfu Pasca Perang Dunia II

Setelah perang berakhir, para wanita *jugun ianfu* dipulangkan ke negara asal mereka di Asia Tenggara, namun ada juga yang dibiarkan menetap di tempat dimana mereka dipekerjakan sebagai wanita penghibur karena daerah yang mereka tempati tidak stabil. Para tentara yang merasa iba kepada wanita tersebut akhirnya menyeludupkan mereka ke dalam kapal agar bisa pulang.

Dalam beberapa kasus, ada juga para tentara lain yang enggan untuk memulangkan para wanita tersebut namun akhirnya terpaksa untuk memberikan tumpangan kepada mereka. Menurut pers Amerika pada tahun 1994, hanya sekitar 30% dari 80% wanita *jugun ianfu* asal Korea yang tercatat selamat dari perang. Hal ini terjadi karena sebagian besar para wanita *jugun ianfu* dibunuh oleh beberapa unit tentara Jepang. Alasan mereka melakukannya karena bagi para tentara Jepang, akan sangat memalukan bagi Jepang untuk tetap membiarkan para wanita *jugun ianfu* hidup dan bisa menjadi penghalang para tentara untuk mengungsi.

Para wanita *jugun ianfu* asal Korea menganggap bahwa kembali ke rumah tidak membuat mereka lega. Mereka diasingkan oleh keluarga, teman dekat, bahkan masyarakat sekitar karena curiga dengan pekerjaan yang mereka lakukan selama pergi dari rumah untuk waktu yang lama. Para wanita ini mengalami kesulitan ekonomi dan mencoba untuk melakukan pekerjaan apa saja agar bisa bertahan hidup. Kim Bun Su, seorang wanita mantan *jugun ianfu* menjelaskan “saya mencari nafkah dengan berjualan apa saja yang saya dapat seperti tembakau, sayuran dan kerupuk nasi.”

Masa-masa yang telah para wanita mantan *jugun ianfu* alami selama masa perang membuat mereka menjadi trauma serta terkena penyakit kelamin. Hal ini juga yang menjadi penghambat peluang mereka untuk memiliki keluarga dan hidup dengan tenang. Selain itu, para wanita mantan *jugun ianfu* asal Korea harus menghadapi budaya patriarkal Korea, yaitu dimana mengungkapkan masa lalu mereka yang buruk akan menjadi sebuah aib keluarga dan ini membuat mereka menjadi tertekan secara emosional karena harus tetap menyembunyikan masa lalu mereka yang dulunya menjadi seorang budak seksual tentara Jepang. Dalam pandangan budaya Korea pada masa itu, seorang wanita terhormat adalah wanita yang berbudi luhur dan baik.

Selain dikucilkan, para wanita mantan *jugun ianfu* juga mengalami berbagai penyakit akibat menjadi budak seksual serta sering mendapatkan pelecehan seksual selama masa perang. Seperti yang dialami oleh salah satu wanita mantan *jugun ianfu* yang bernama Hwang Keum Ju yang diwawancarai di Seoul pada bulan November 1994 “saya tidak bisa menggambarkan rasa sakit dan kesulitan yang saya alami setelahnya. Mereka (Jepang) memberi saya penyakit, dan saya mengalami pendarahan begitu banyak sehingga saya kehilangan rahim. Sudah lebih dari 35 tahun sekarang, dan saya hidup hanya dengan obat penisilin.”

Para wanita *jugun ianfu* asal Korea yang berhasil selamat dari perbudakan seksual dan usaha pembunuhan yang dilakukan oleh para tentara Jepang untuk menghilangkan bukti kejahatan mereka harus hidup dalam penderitaan yang berkepanjangan akibat mengalami penyakit fisik yang bahkan sampai harus kehilangan rahim dan mengalami sakit kepala yang parah. Mereka juga menjadi korban budaya patriarki yang berlaku di Korea serta mengalami trauma seperti diseret oleh tentara Jepang. Selain itu, mereka juga menghindari untuk bertemu dengan banyak orang akibat rasa malu yang mereka tanggung karena pernah menjadi seorang wanita penghibur.

Upaya Awal Masyarakat Korea Selatan Untuk Korban Mantan Jugun Ianfu

1. Mengungkapkan kasus jugun ianfu ke surat kabar

Permasalahan *jugun ianfu* ini akhirnya diungkap ke publik dan dibahas secara terbuka setelah demokratisasi pada tahun 1987. Lalu Yun Chunnng Ok, yang merupakan seorang jurnalis menerbitkan sebuah artikel yang membahas kasus *jugun ianfu* di Koran *Hakyoreh* pada bulan Januari 1990. Karena berita ini, kasus jugun ianfu di Korea Selatan semakin besar.

2. Mengadakan Demonstrasi di Seoul

Pada bulan Januari 1989, beberapa organisasi wanita Korea mengadakan demonstrasi di Seoul, memprotes rencana pemerintah Korea Selatan untuk mengirim utusan ke pemakaman Kaisar Hirohito. Bahkan menulis surat yang mengatakan bahwa pemerintah harus mengatasi masalah korban mantan jugun ianfu yang berasal dari Korea atau yang disebut dengan *Chongsindae*.

3. Mengeluarkan Deklarasi dan Tuntutan

Kasus ini semakin meluas di Korea ketika salah satu wakil pemerintah dari Komite Anggaran Dewan menjawab salah satu pernyataan dari anggota Diet yang menuntut pemerintah Jepang untuk menyelidiki kembali kasus jugun ianfu pada tanggal 6 Juni 1990. Pada 30 Oktober 1990, 37 organisasi Korea bergabung dengan korps sukarelawan dan mengeluarkan deklarasi yang berisi kritikan dan tuntutan untuk pemerintah Jepang agar mau mengakui keterlibatan mereka dalam pembentukan sistem *jugun ianfu*.

4. Mengirimkan Petisi Kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Pada tanggal 4 Maret 1992, Lee Hyo Chae, wakil ketua dari *Korean Council for the Women Drafted for Military Sexual Slavery by Japan* (KCWS) mengajukan petisi kepada Komisi Hak Asasi Manusia PBB dan meminta agar mereka menyelidiki kekejaman Jepang kepada para wanita Korea selama masa Perang Dunia II. Lee Hyo Chae juga meminta agar Komisi HAM PBB membantu untuk menekan Pemerintah Jepang agar memberikan kompensasi kepada setiap korban yang sudah mengajukan gugatan.

5. Memberikan Kesaksian dan Menggugat Pemerintah Jepang ke Pengadilan

Kim Hak Soon, seorang korban mantan *jugun ianfu* yang berasal dari Korea menggugat pemerintah Jepang ke *Tokyo District Court* atas kejahatan seksual yang mereka lakukan bersama para wanita Korea lainnya yang menjadi korban pada tahun 1991. Dalam gugatan tersebut, mereka meminta Jepang untuk meminta maaf secara resmi dan tulus kepada setiap korban, memberikan kompensasi, tuntutan untuk pelanggaran kejahatan perang memberikan edukasi kepada masyarakat tentang kejamnya sistem *jugun ianfu* dan memasukkan sejarah jugun ianfu ke dalam buku

pelajaran sekolah di Jepang serta adanya tugu peringatan yang berisi nama-nama korban yang telah meninggal.

Kim Hak Soon hanyalah korban satu-satunya yang mengungkapkan namanya di pengadilan dan menceritakan pengalamannya menjadi seorang *jugun ianfu* yang dimana saat itu para tentara Jepang datang dan memukulinya. Mereka berkata kepada Kim Hak Soon bahwa dia akan direkrut menjadi karyawan tekstil dan bisa mendapatkan gaji yang tinggi. Namun pada kenyataannya, hari pertama Kim Hak Soon dibawa ke *comfort station* dan diperkosa disana.

Beberapa tahun seteealah Kim Hak Soon memberikan kesaksiannya di Tokyo Distric Court, beberapa wanita Korea yang juga korban mantan jugun ianfu mengikuti caranya untuk ikut menggugat pemerintah, termasuk Son Siin Do, seorang wanita Korea-Jepang yang saat itu tinggal di Jepang.

Upaya Pemerintah Korea Selatan

1. Berjanji Untuk Mendesak Pemerintah Jepang dan Memberikan Kompensasi Rutin Kepada Para Korban

Pada bulan Maret 1993, Presiden Korea Selatan, Kim Young Nam, mengumumkan bahwa Pemerintah Korea Selatan tidak akan menuntut kompensasi dari Pemerintah Jepang untuk para korban mantan wanita penghibur, tetapi akan menuntut penyelidikan penuh kepada Jepang untuk mengungkap kebenaran dan membuat permintaan maaf yang tulus. Selain itu, Pemerintah Korea Selatan memberikan dana sebesar 5 juta won untuk setiap korban dan akan memberikan tunjangan tambahan sebesar 250.000 won setiap bulan.

2. Mengunjungi Jepang dan Mengadakan Pertemuan Dengan Perdana Menteri Jepang

Presiden Korea Selatan yang saat itu baru terpilih, Kim Dae Jung beserta ibu negara melakukan kunjungan ke Jepang sebagai tamu negara pada tanggal 7-10 Oktober 1998. Selama di Jepang, Presiden Kim Dae Jung mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Jepang, Keizo Obushi. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Kim Dae Jung mengatakan secara sepihak bahwa Korea Selatan tidak akan membahas tentang masalah jugun ianfu jika Jepang mau memberikan permintaan maaf yang tulus.

3. Terus Mendesak Jepang Untuk Meminta Maaf Agar Kasus Jugun Ianfu Dapat Diselesaikan

Pada masa awal jabatan Roh Moo Hyun sebagai presiden, KCWs terus meminta agar Pemerintah Korea Selatan kembali mendesak Jepang dan menyelesaikan kasus jugun ianfu, namun saat itu sikap Presiden Roh Moo Hyun masih pasif dan tidak mau membahas kasus jugun ianfu dalam berbagai kesempatan ketika bertemu dengan Jepang. Namun akhirnya pada tahun 2003, Roh Moo Hyun aktif untuk terus meminta Jepang segera menyelesaikan tanggung jawab hukumnya dan merilis permintaan maaf.

4. Membawa Kasus Jugun Ianfu Ke Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Korea Selatan mengangkat kasus tanggung jawab hukum Jepang untuk masalah kasus jugun ianfu pada pertemuan Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat pada bulan Oktober 2011. Shin Dong Ik, perwakilan tetap Korea Selatan di PBB mengatakan bahwa Jepang mengklaim telah menyelesaikan kasus jugun ianfu secara legal dan memberikan pernyataan bahwa masalah wanita penghibur adalah kejahatan yang tidak manusiawi, tidak dapat diselesaikan hanya dengan penyelesaian melalui perjanjian klaim Korea-Jepang serta tanggung jawab ada di pihak Jepang.

5. Membuat Kesepakatan Final and Irrversible dengan Pemerintah Jepang

Perdana Menteri Shinzo Abe dan Presiden Korea Selatan yang menjabat saat itu, Park Geun Hye mengadakan pertemuan bilateral di Seoul, Korea Selatan pada bulan November 2015 untuk membahas penyelesaian kasus jugun ianfu serta peringatan 50 tahun hubungan normalisasi Korea Selatan dan Jepang. Pada 28 Desember 2015, Jepang dan Korea Selatan mengeluarkan kesepakatan Final and Irrversible. Perjanjian ini diumumkan melalui pernyataan paralel yang dikeluarkan oleh Menteri Luar Negeri Jepang Fumio Kishida dan Menteri Luar Negeri Korea Selatan Yun Byeong Sei setelah melalui beberapa kali konsultasi dengan pejabat senior dari Jepang dan Korea Selatan.

6. Menutup Yayasan Jugun Ianfu yang Didanai Pemerintah Jepang

Hubungan Korea Selatan dan Jepang mulai merenggang ketika Pemerintah Korea Selatan mengumumkan bahwa mereka akan menutup yayasan untuk para korban mantan jugun ianfu yang didanai oleh Jepang. Hal ini membuat Pemerintah Jepang marah dan Menteri Luar Negeri Jepang, Taro Kono mengatakan bahwa keputusan itu tidak bisa diterima oleh Jepang. Kementerian Luar Negeri Jepang juga memanggil Duta Besar Korea Selatan untuk membahas masalah ini.

7. Memprotes Keputusan Pemerintah Jerman untuk Memindahkan Patung Wanita Penghibur

Pemerintah setempat dari Distrik Mitte, Berlin telah membuat sebuah keputusan yang meminta agar patung wanita penghibur yang dibangun di Berlin segera dipindahkan. Karena keputusan ini, sebuah kelompok sipil pro-Korea mengajukan protes dan mengirimkan petisi ke Pengadilan Berlin agar keputusan tersebut dapat ditangguhkan. Selain itu, 113 politisi Korea Selatan dan anggota parlemen juga mengirim surat ke Kedutaan Besar Jerman di Seoul yang berisi penyesalan dan keprihatinan mereka atas keputusan dari Pemerintah Distrik Mitte.

Kesimpulan

Korea Selatan telah melakukan berbagai upaya agar Jepang mau menyelesaikan tanggung jawab hukumnya dengan mengungkapkan kasus jugun ianfu ke publik yaitu membahas kasus tersebut di koran Hakyoreh pada tahun 1987. Kemudian kasus jugun

ianfu mendapat perhatian masyarakat internasional ketika Kim Hak Soon, salah satu korban mantan jugun ianfu menggugat pemerintah Jepang ke *Tokyo Distric Court* bersama beberapa korban yang lain dan bersaksi mengenai bagaimana kejamnya para tentara Jepang selama perbudakan seksual berlangsung.

Upaya lain yang dilakukan oleh kedua negara ini untuk menyelesaikan kasus *jugun ianfu* adalah dengan membuat kesepakatan *final and irreversible* pada tahun 2015, di masa pemerintahan Park Geun Hye. Pemerintah Jepang berharap kesepakatan bisa menyelesaikan kasus jugun ianfu yang sudah diperjuangkan oleh para korban selama berpuluh-puluh tahun dan juga memenuhi tanggung jawab hukum mereka kepada para korban yang masih ada hingga saat ini. Namun, di masa pemerintahan Presiden Moon Jae In, menolak kesepakatan *final and irreversible*. Presiden Moon Jae In mengatakan isi kesepakatan tersebut tidak mewakili pendapat para korban mantan *jugun ianfu* serta kasus *jugun ianfu* tidak bisa diselesaikan hanya dengan kesepakatan saja.

Daftar Pustaka

Buku

Hicks, L George. 1997, *Comfort Women : Japan's Brutal Regime of Enforced Prostitutions in the Second World War*, London, Paperback.

Howard, Keith 1995, *True Stories of the Korean Comfort Women*, London: Cassell.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. 2013, *Pengadilan Kejahatan Perang Internasional Terhadap Perempuan Keputusan 4 Desember 2001*, Jakarta, Komnas HAM.

Maki, Kimura. 2016, *Unfolding the 'Comfort Women' Debates : Modernity, Ciolence, Women's Voices*, New York, Palgrave Macmillan.

Starke, J.G. 2008. *Pengantar Hukum Internasional 2 Edisi Kesepuluh*, Jakarta, Sinar Grafika.

Jurnal

Argibay, Carmen M. 2003, *Sexual Slavery and the Comfort Women of World War II*, *Berkeley Journal of International Law*, Vol.21 Issue 2.

Orreill, Kirsten 2008, *Who are the Ianfu (Comfort Women)?*, *University of Queensland*, Vol.2.

Sarah Soh, Chunghee 1996, *The Korean "Comfort Women": Movement for Redress*, *Asian Survey*, Vol. 36, No.12.

Watanabe, Kazuto, Trafficking in Women's Bodies Then and Now : The Issue of Military Comfort Women, *Women's Studies Quarterly*, Vol.27, No.1/2.

Websites

Antara News 2007, Ahli Sejarah Beberkan Dokumen Buktikan Praktek "Jugun Ianfu" <http://m.antaranews.com/berita/59458/ahli-sejarah-beberkan-dokumen-buktikan-praktek-jugun-ianfu>.

ABC News 2013, Japanese Politician Defends Use of Sex Slaves, <https://www.abc.net.au/news/2013-05-14/japanese-politician-defends-wartime-use-of-sex-slaves/4687332>.

Annexe 2 - Charter of The Women's International War Crimes Tribunal On Japan's Military Sexual Slavery, <https://journals.openedition.org/droitcultures/2189>.

Asia News.It 2011, "Treated Worse Than an Animal": The 'Comfort Women' Issue Before the United Nations <http://www.asianews.it/news-en/%E2%80%9CTreated-worse-than-an-animal%E2%80%9D:-the-%E2%80%98comfort-women%E2%80%99-issue-before-the-United-Nations-22913.html>.

BBC News 2011, Korea 'comfort women' put up statue at landmark rally <http://www.bbc.com/news/world-asia-16185314>

CGTN, Controversial Berlin Statue for 'Comfort Women' Allowed to Remain <https://news.cgtn.com/news/2020-10-16/Controversial-Berlin-statue-for-comfort-women-could-remain-UCWbsofzSo/img/b2f7c0bd00b74d229b63bc29aa9a4118/b2f7c0bd00b74d229b63bc29aa9a4118.png>

Duke Student Affairs, Impact of Sexual Violence https://studentaffairs.duke.edu/sites/default/files/u7/NSVRC_Publication_Factsheet_Impact-of-sexual-violence.pdf

Kompasiana 2007, Comfort Women : Sisi Gelap Sejarah Jepang <https://www.kompasiana.com/rrnoor/568314bf4ef9fd68048b4571/comfort-women-sisi-gelap-sejarah-jepang?page=all>.

Korean Times 2007, Comfort Women Used to Prevent Military Revolt During War http://www.koreatimes.co.kr/www/news/nation/2015/10/117_14697.html.

Liputan 6 2017, Jepang dan Korsel Bersitegang Soal Budak Seks Perang Dunia II, <https://www.liputan6.com/global/read/3208774/jepang-dan-korsel-bersitegang-soal-budak-seks-perang-dunia-ii>.

Ministry of Foreign Affairs of Japan, Statement by the Chief Cabinet Secretary Yohei Kono on the Result of the Study on the Issue of "Comfort Women" <https://www.mofa.go.jp/policy/women/fund/state9308.html>.

Project by Country or Region-South Korea, <http://www.awf.or.jp/e3/korea.html>.